

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA SAMARINDA

Emilia Malinda¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda, dan untuk mengidentifikasi gambaran apa saja yang menjadi faktor penghambat Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini mengacu pada kegiatan utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan key informan dan informan, dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen Dinas Perhubungan di Kota Samarinda maupun dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan proses Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda terkait kegiatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor yang menghambat seperti keterbatasan anggaran, prasarana yang tidak memadai, lamanya proses pengadaan serta kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Kata Kunci: Peranan, penerangan.

Pendahuluan

Samarinda sebagai Ibukota Kalimantan timur dalam penyediaan prasarana jalan berupa lampu penerangan jalan umum dapat dikatakan masih kurang, karena masih banyak jalan yang ada di Samarinda masih gelap. Pengadaan lampu penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Kalaupun ada, beberapa lampu penerangan jalan yang ada mati karena kurangnya pemeliharaan. Pemeliharaan adalah hal yang wajib agar lampu penerangan jalan umum yang ada tetap berfungsi.

Jalan raya dengan fasilitas penerangan jalan yang buruk dan minim dapat dijadikan tempat pilihan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: emalinda803@gmail.com

ditambah lagi dengan kondisi jalan yang cukup sepi. Minimnya lampu penerangan jalan umum juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak dan beberapa hal lainnya. Jika lampu penerangan jalan umum yang ada memadai masyarakat akan lebih nyaman jika ingin berpergian di malam hari.

Berdasarkan laporan warganya, pihak Kecamatan Sungai Kunjang mencatat tentang kondisi lingkungan yang rawan aksi tindak kejahatan akibat faktor kurangnya lampu penerangan yang ada khususnya di jalur Jalan Jakarta yang berada persis dekat Masjid Ar-Rasyidin, Loa Bakung. Menurut Camat Sungai Kunjang Samilan Noor “Di kawasan itu sudah beberapa kali terjadi kecelakaan hingga merenggut nyawa dan aksi jambret. Karena, daerah tersebut sangat gelap sekali jika malam, hal ini disebabkan tidak adanya lampu penerangan tadi.”(Koran Kaltim, 2018)

Sampai sekarang, penerangan jalan umum di Samarinda masih minim. Terutama di ruas jalan yang merupakan pintu masuk Kota Tepian. Seperti Jalan A.M. Rifaddin, Jalan APT Pranoto, dan Jalan Suryanata. Penerangan minim dan belum memenuhi seluruh ruas jalan (Kaltim Post, 2018). Dengan penerangan jalan yang baik akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Penerangan jalan umum di Samarinda sangat memprihantinkan. Beberapa sudut kota saat malam hari sangat minim penerangan. Pasalnya, lampu penerangan jalan yang tampak usang. Akibatnya, masyarakat yang melintas ketika malam hari merasa ketakutan karena gelap, sehingga aktivitas warga berkurang dan ditakutkan marak kriminalitas di wilayah tersebut (klikamarinda,2017).

Penempatan lampu penerangan jalan umum di jalan dua arah yang ada di Samarinda juga biasanya hanya diletakkan di satu sisi jalan saja. Sehingga menyebabkan jalan di sisi lainnya tidak mendapat penerangan, contohnya seperti Jalan P.M Noor dan Jalan K.H Wahid Hasyim yang lalu lintasnya lumayan padat dan juga di Jalan P.M Noor beberapa tiang-tiang dari lampu penerangan yang ada seharusnya sudah diganti dengan yang baru karena ada beberapa yang sudah rusak dan bahkan ada beberapa bola lampu yang juga hilang. Dari hasil observasi peneliti juga saat ini di Samarinda lampu penerangan jalan umum yang ada kebanyakan masih konvensional yang boros listrik sedangkan yang menggunakan lampu LED masih beberapa jalan saja.

Salah satu bentuk ketidakpedulian pemerintah daerah dalam hal pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum juga dapat dilihat dari tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus dibuat untuk membahas tentang lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda, hal ini jugalah menjadi penyebab lambatnya pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dalam menangani masalah lampu penerangan jalan umum.

Selain itu permasalahan mengenai lampu penerangan jalan umum yang ada karena perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda masih belum memenuhi sasaran disebabkan oleh anggaran yang terbatas. Pengawasan

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga masih kurang ketat sehingga sasaran yang sudah direncanakan tidak semua dapat berjalan dengan efektif sehingga kegiatan atau proyek tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Maka dari itu tugas pokok dan fungsi dalam hal evaluasi perlu dilakukan seobyektif mungkin agar perencanaan ke depan dapat dicapai.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti masih banyak jalan yang ada di Samarinda tidak memiliki lampu penerangan jalan umum. Ini merupakan salah satu bentuk kurang berjalannya tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan sendiri sebagai instansi yang terkait. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis **“Peranan Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda.”**

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Organisasi

Organisasi adalah sekelompok manusia yang dengan sengaja dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan (Veithzal, 2003:56). Manusia sebagai anggota organisasi tadi masing-masing tentu mempunyai tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Mereka melakukan semua itu harus dalam suatu forum pembagian kerja, pembagian waktu, dan koordinasi yang setepat-tepatnya sehingga terhindar dari pemborosan-pemborosan dan masalah-masalah.

Dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah tempat atau wadah sekelompok orang yang berkerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana setiap anggotanya mempunyai tugasnya sendiri, maka dari itu organisasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas masing-masing anggotanya.

Pengertian Peranan

Menurut Gross, Mason dan McEachern (dalam David Berry, 2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012: 212-213).

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004: 160) mengemukakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Hendropusprio, 1989:185 dalam Narwoko, 2004:160).

Kebijakan Publik

Carl Friederich (dalam Winarno, 2012- 20) mengemukakan ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Amir Santoso (dalam Winarno, 2012-22), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. *Pertama*, pendapat ahli menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (1999, 24-25) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy options*) yang ada.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.
Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah bagaimana seseorang, kelompok maupun organisasi menyelesaikan suatu masalah di masyarakat dengan mencari apa saja faktor-faktor munculnya permasalahan tersebut sebelum akhirnya dibuat menjadi peraturan untuk diterapkan di masyarakat.

Pengertian Pengadaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadaan adalah proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan dan sebagainya. Menurut Gunawan (1996:135) mengatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas (studentsmkyapsa.blogspot.com, 2018).

I Putu Jati Arsana (2016: 35) mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan

dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu).

Willem Siahaya (2013:10) mengatakan filosofi pengadaan adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis dan mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Pengertian Pemeliharaan

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa Yunani terein artinya merawat, menjaga dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2001: 642), dalam bukunya "*Operations Management*" pemeliharaan adalah: "*all activities involved in keeping a system's equipment in working order*". Artinya pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik.

Menurut M.S Sehwat dan J.S Narang (2001), dalam bukunya "*Production Management*" pemeliharaan (*maintenance*) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar fungsional dan kualitas. Selanjutnya, menurut Sofyan Assauri (2008:134) *maintenance* adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Antony Corder (1996:2-3) mengatakan menurut definisi istilah, pemeliharaan pada kenyataannya menunjuk kepada fungsi pemeliharaan secara keseluruhan yang bisa dibayangkan, dan sebagai hasilnya, kata tersebut dengan longgar digunakan dalam industri untuk menunjuk setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja bagian pemeliharaan. Memelihara pada suatu standar yang bisa diterima merujuk pada standar yang ditentukan oleh organisasi yang melakukan pemeliharaan. Hal ini berbeda dari satu organisasi dengan yang lain, tergantung keadaan industrinya dan sepadan dengan nilai yang ditetapkan berdasar standar yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan adalah salah satu bentuk bagaimana mengurangi pengeluaran oleh pemerintah dengan cara menjaga agar peralatan yang ada tetap terawat dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Pengertian Lampu Penerangan Jalan Umum

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 7391 Tahun 2008, lampu penerangan jalan adalah (a) bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan

yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah; (b) suatu unit pelengkap yang terdiri dari sumber cahaya, elemen optik, elemen elektrik dan struktur penopang serta pondasi tiang lampu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif dapat diketahui secara obyektif peranan Dinas Perhubungan dalam pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki.

Adapun fokus penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan Dinas Perhubungan dalam pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Samarinda yaitu:
 - a) Perencanaan
 - b) Pengawasan
 - c) Evaluasi
2. Faktor yang menghambat peranan Dinas Perhubungan dalam pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Peranan Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda

Perencanaan

Perencanaan sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang didasarkan pada Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2016 bersama dengan para *stakeholder* yang terkait dan lampu penerangan jalan umum merupakan salah satu yang diprioritaskan di dalam kegiatan tersebut.

Dalam proses perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan bersama dengan *stakeholder* lainnya diketahui bahwa tidak semua daerah dapat dilakukan pengadaan disebabkan anggaran yang tersedia dari APBD Kota Samarinda tidak mencukupi sehingga harus menyesuaikan dengan keuangan pemerintah kota. Maka dari itu Dinas Perhubungan khususnya bidang prasarana membuat prioritas daerah mana saja yang akan dipasang lampu penerangan jalan umum berdasarkan tingkat kerawanan dari daerah tersebut. Prioritas yang dibuat bidang prasarana berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana. Kebutuhan akan lampu penerangan jalan umum yang diperoleh bidang prasarana berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang tersebut.

Dalam pelaksanaan perencanaan di Dinas Perhubungan kaitannya dengan lampu penerangan jalan umum, tentunya ada pihak-pihak yang harus dihadirkan untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Berikut nama-

nama instansi/lembaga yang mengikuti rapat terkait perencanaan kegiatan dan program di Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang
4. Kelurahan
5. Kecamatan
6. PLN
7. Kepolisian
8. Dinas Perumahan dan Pemukiman
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Dinas Pendapatan daerah

Instansi/lembaga di atas mempunyai peran penting dalam jalannya proses perencanaan terkait tersedianya lampu penerangan jalan umum yang ada di Kota Samarinda. Pengadaan yang dilakukan Dinas Perhubungan sangat berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan pengadaan lampu penerangan jalan umum harus dilakukan secara cermat dan teliti, karena hal ini merupakan kegiatan yang sangat penting.

Dinas Perhubungan sebelumnya telah melakukan pengumpulan informasi melalui kegiatan musrenbang namun dirasa peneliti masih kurang. Kegiatan musrenbang sendiri merupakan acara tahunan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang ada di masyarakat terutama terkait dengan lampu penerangan jalan umum. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang hampir setiap hari terkait penyediaan lampu penerangan jalan umum maka diperlukan koordinasi yang terjalin secara baik antara masyarakat dan Dinas Perhubungan. Sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam penyampaian informasi terkait lampu penerangan jalan umum di daerahnya.

Pengawasan

Dinas Perhubungan sudah melakukan pengawasan terkait lampu penerangan jalan umum namun terkendala akan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bertugas melakukan pemantauan di lapangan.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan prasarana di Kota Samarinda, Dinas Perhubungan tentu saja harus bekerja sama untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman dan PLN. Lampu penerangan jalan umum dibawah oleh 2 instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman namun berbeda kewenangan. Dinas Perhubungan melakukan pengadaan dan pemeliharaan di jalan-jalan utama dan jalan poros sedangkan Dinas Perumahan dan Pemukiman mengurus jalan-jalan kecil seperti gang, perumahan, dan sebagainya. Sehingga apabila bukan merupakan

kewenangannya, Dinas Perhubungan terlebih dahulu melakukan koordinasi ke instansi yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait dengan pengawasan lampu penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan sejauh ini masih belum berjalan secara baik, dikarenakan belum adanya koordinasi secara maksimal kepada masyarakat, tidak adanya bentuk kerjasama memperlambat Dinas Perhubungan dalam melakukan pengadaan dan pemeliharaan. Walaupun Dinas Perhubungan mempunyai petugas lapangan namun dirasa peneliti masih kurang karena lingkup Kota Samarinda yang besar. Pengawasan sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan. Hal ini dinilai belum maksimal oleh penulis karena masih minimnya lampu penerangan jalan umum yang ada di Samarinda dan sumber daya manusia (SDM) dari Dinas Perhubungan yang kurang untuk melakukan pengelolaan lampu penerangan jalan umum.

Evaluasi

Evaluasi sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan sebelumnya itulah yang akan menjadi bahan untuk dievaluasi, apa saja yang menjadi kendala sewaktu di lapangan. Dengan adanya evaluasi, Dinas Perhubungan khususnya bidang prasarana dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai selama ini terkait pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan melakukan rapat evaluasi kinerja dan serapan anggaran. Rapat yang diadakan pertriwulan ini membahas kendala yang dihadapi di lapangan dan laporan-laporan yang diterima terkait lampu penerangan jalan umum dan melihat sejauhmana perencanaan yang sudah disusun dapat tercapai.

Hasil yang diharapkan dari proses evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini bertujuan agar lampu penerangan jalan umum dapat terpelihara dengan baik. Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan Dinas Perhubungan sudah melakukan evaluasi untuk dapat melihat sejauhmana permasalahan terkait lampu penerangan jalan umum dapat ditangani. Dalam hal evaluasi, penulis merasa Dinas Perhubungan sendiri sudah cukup baik walaupun masih ada keluhan dari masyarakat.

Kegiatan berupa penyediaan lampu penerangan jalan umum di jalan Kota Samarinda sejauh ini sudah cukup baik. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pengadaan dan pemeliharaan rutin. Adapun maksud yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terbangun dan tersedianya lampu penerangan jalan umum Kota Samarinda diharapkan nantinya Samarinda memiliki lampu penerangan jalan umum di setiap ruas jalannya. Hasil dari kegiatan sudah terlihat di beberapa daerah di Samarinda namun belum secara menyeluruh dikarenakan masih banyak jalan yang minim penerangan.

Dapat diketahui bahwa permasalahan Dinas Perhubungan dalam hal evaluasi adalah mengenai jumlah pegawai dalam program penyediaan lampu penerangan jalan umum masih kurang. Prasarana juga belum optimal dimana hanya terdapat kendaraan berupa 1 mobil perbaikan lpju dan 2 pick up. Kegiatan yang dilakukan dinilai sudah sesuai walaupun dilakukan secara bertahap, dapat dilihat dengan adanya penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED yang hemat energi dan pengadaan lampu penerangan jalan umum yang rawan kriminalitas. Lokasi yang dipilih juga telah dipilih berdasarkan hasil survey lokasi untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan merupakan jalan umum atau jalan lingkungan, rawan kecelakaan, rawan kriminalitas, dan gangguan sosial.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasa cukup dengan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda namun untuk beberapa jalan tertentu dirasa kurang mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan. Karena sering saja terlihat ada lampu padam karena kurangnya pemeliharaan dan juga masyarakat ada yang merasa ketakutan berjalan di malam hari disebabkan ada jalan yang tidak memiliki lampu penerangan jalan umum.

Faktor Penghambat Peranan Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda, ditemukan beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum tersebut. Dimana faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah harus melakukan berbagai macam program, proyek, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyatnya. Adanya suatu program tak luput dari dukungan sumber daya yang ada. Termasuk di dalamnya adalah dukungan sumber daya keuangan. Dalam hal ini pemerintah yaitu Dinas Perhubungan membutuhkan anggaran untuk melaksanakan berbagai macam program. Anggaran selalu menjadi hal yang utama dalam melaksanakan sebuah kegiatan dan program. Walaupun perencanaan yang sudah dilakukan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkungannya, apabila anggaran yang ada tidak mencukupi maka perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa tidak akan berjalan dengan maksimal.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan bahwa anggaran yang diberikan Dinas Perhubungan berupa dana APBD dan APBN masih kurang dalam melakukan pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, terutama di Dinas Perhubungan bukan hanya berkaitan dengan lampu penerangan jalan umum saja sehingga anggaran yang ada harus dikelola dengan baik. Karena semua kegiatan baik itu perencanaan,

pengawasan, dan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya.

Dinas Perhubungan sendiri dalam melakukan pengadaan dan pemeliharaan terkait lampu penerangan jalan umum sering terkendala oleh masalah anggaran yang diberikan sehingga tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan tidak berjalan dengan efektif. Keterbatasan dana yang dimiliki mengakibatkan beberapa lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda tidak dapat dirawat dengan baik. Untuk tahun 2018 saja anggaran yang diberikan sebesar 5 miliar, itu tidak cukup untuk melakukan pengadaan dan pemeliharaan keseluruhan Kota Samarinda. Sehingga ada jalan-jalan yang diprioritaskan oleh Dinas Perhubungan khususnya bidang prasarana untuk saat ini seperti Jalan A.M Rifaddin yang berada di Samarinda Seberang dan Pangeran Suryanata.

2. Prasarana tidak memadai

Salah satu faktor yang menunjang Dinas Perhubungan khususnya bidang prasarana dalam melaksanakan tugasnya di lapangan adalah fasilitas seperti halnya kendaraan. Untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan dibutuhkan kendaraan berupa mobil maupun motor dan juga untuk bidang prasarana sendiri dibutuhkan mobil perbaikan lpu. Dengan adanya fasilitas yang mendukung akan membantu Dinas Perhubungan dalam melakukan tugasnya.

Namun pada kenyataannya Dinas Perhubungan khususnya bidang prasarana hanya memiliki 1 unit mobil perbaikan lpu dan 2 unit pick up. Tentu saja hal ini sangat kurang untuk mengawasi lampu penerangan jalan yang ada di Samarinda dan berdampak pada pengadaan dan pemeliharaan yang dilakukan karena tidak berjalan dengan maksimal. Penyediaan fasilitas yang layak untuk sarana penyelenggaraan pemerintah dinilai menjadi hal yang penting.

3. Lamanya Proses Pengadaan

Setelah peneliti melakukan penelitian diketahui bahwa dalam proses pengadaan lampu penerangan jalan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan khususnya bidang prasarana adalah terkendala karena banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengadaan tersebut dan bukan hanya itu perhitungan konsultan juga memakan waktu yang cukup lama. Sehingga pengadaan lampu penerangan jalan umum tidak bisa dilakukan secara cepat.

Dengan demikian dalam proses pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda masih banyak terdapat kendala-kendala yang dimana merupakan permasalahan yang merupakan faktor internal dari Dinas Perhubungan sendiri.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah petugas lapangan untuk menangani keseluruhan masalah lampu penerangan jalan umum menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Lingkup Kota Samarinda yang besar tidak sesuai dengan jumlah petugas lapangan, sehingga kadang-kadang tidak dapat menangani

permasalahan yang ada. Hal ini mengakibatkan sejumlah lampu penerangan jalan umum yang ada tidak mendapat penanganan dengan segera karena keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan. Sehingga lampu penerangan jalan umum yang rusak menjadi lambat ditangani yang mengakibatkan minim penerangan di malam hari. Untuk saat ini petugas lapangan yang dimiliki bidang prasarana hanya 17 orang. Jumlah tersebut dirasa belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting terutama dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda dan harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari organisasi. Karena pentingnya peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi maka pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan yang menjadi faktor penghambat utama Dinas Perhubungan dalam pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum adalah anggaran. Keterbatasan anggaran yang diberikan Dinas Perhubungan khususnya untuk pengelolaan lampu penerangan jalan umum menjadi penyebab banyak jalan yang ada di Samarinda masih minim penerangan. Selain itu prasarana yang tidak memadai, SDM yang terbatas, dan lamanya proses pengadaan menjadi faktornya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda yaitu:
 - a. Perencanaan
Penulis dapat melihat bahwa bahwa perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan sejauh ini dapat dikatakan cukup baik dalam pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda, hanya saja permasalahan yang terjadi ialah terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Dinas Perhubungan sehingga harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kerawanan dari daerah tersebut.
 - b. Pengawasan
 - c. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan dapat dikatakan masih belum cukup baik dan maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang bertugas di lapangan masih kurang dibandingkan luasnya Kota Samarinda. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya lampu penerangan jalan umum yang rusak dan tidak terawat.
 - d. Evaluasi

- e. Dalam hal evaluasi Dinas Perhubungan dapat dikatakan sudah cukup baik walaupun masih adanya keluhan dari masyarakat terkait lampu penerangan jalan umum. Walaupun demikian Dinas Perhubungan khususnya bidang prasarana jalan telah membuka forum rapat koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait pertriwulan. Didalamnya diliat apa saja kendala di lapangan dan laporan-laporan yang diterima dari masyarakat terkait lampu penerangan jalan umum dan melihat sejauhmana perencanaan yang sudah disusun dapat tercapai.
2. Faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Samarinda adalah kurangnya anggaran yang diberikan sehingga pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum ini dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di Samarinda mana yang lebih diprioritaskan, prasarana yang kurang memadai, dan proses pengadaan yang memakan waktu yang lama serta SDM yang terbatas menjadi penghambatnya.

Saran

1. Dinas Perhubungan dapat menggunakan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya. Penggunaan PJU-TS merupakan solusi yang tepat dikarenakan tidak hanya menggunakan tenaga surya yang ramah lingkungan namun juga biaya energi PJU-TS lebih murah dibandingkan PJU-PLN, dikarenakan menggunakan sumber energi surya yang relatif tidak terbatas.
2. Sebaiknya Dinas Perhubungan mengalokasikan anggaran untuk prasarana sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan terutama berupa unit mobil perbaikan lampu penerangan jalan umum di lapangan dalam rangka pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum agar lebih efektif dikarenakan prasarana yang ada sekarang kurang memadai.
3. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan khususnya bidang prasarana untuk melakukan rapat rutin untuk membahas perkembangan pelaksanaan proses pengadaan dan disiplin terhadap jadwal yang telah ditentukan sebelumnya sehingga proses pengadaan dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) di bidang prasarana terutama petugas lapangan seksi prasarana jalan sehingga kegiatan dan program dapat berjalan dengan efektif.
5. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan khususnya bidang prasarana lebih memperhatikan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum karena banyak yang sudah mengalami kerusakan seperti tiang yang sudah termakan usia dan ada lampu yang rusak dan perlu diganti yang baru.
6. Dinas Perhubungan perlu berkoordinasi dengan masyarakat dalam hal pengawasan agar kedepannya permasalahan terkait dengan lampu penerangan jalan umum dapat segera diatasi.

Daftar Pustaka

- Adisaputro, Gunawan; Asri, Marwan.1996. “Anggaran Perusahaan”. Yogyakarta: BPFPE.
- Arsana, I Putu Jati. 2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Assauri, Sofjan. 2008. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Berry, David. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barry, Render dan Jay Heizer. 2001. *Prinsip-prinsip Manajemen Operasi :Operations Management*. Jakarta : Salemba Empat.
- Corder, Anthony. 1996. *Teknik Manajemen Pemeliharaan*. Jakarta: Erlangga
- Dunn, William. 1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada Press.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto Eds. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan Edisi Keempat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Schrawat, MS. and JS. Narang, 2001, *Production Manajemen*, 3rd Edition, Dhonpat Rai & Co. (P) Ltd, Delhi.
- iahaya, Willem. 2013. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- SNI 7391. 2008. *Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.

Sumber Internet:

- Oktaviani, Anissa Eka dan Ibah Gama Febrianti. *Pengertian Pengadaan di* <http://studentsmkyapsa.blogspot.com/2018/05/pengertian-pengadaan.html?m=1> (diakses 19 februari 2019).

Dokumen:

- Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2016